

**Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia:  
Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2016**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Dea Anjani Sari  
Nomor Mahasiswa : 16313038  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2018**

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia:  
Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan NusaTenggara Timur  
Tahun 2016

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1  
Jurusan Ilmu Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Dea Anjani Sari  
Nomor Mahasiswa : 16313038  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2018**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Penulis,

  
  
Dea Anjani Sari

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia:  
Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2016

Nama : Dea Anjani Sari  
Nomor Mahasiswa : 16313038  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing



**Moh. Bakti Hendrie Anto, SE., M.Sc.**

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA  
PERBANDINGAN NAGGRO ACEH DARUSSALAM DAN NUSA TENGGARA TIMUR**

Disusun Oleh : **DEA ANJANI SARI**

Nomor Mahasiswa : **16313038**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 7 Februari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Nur Feriyanto, Dr., M.Si



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## ***Motto***

*Hidup itu seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak (Albert Einstein)*

*Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya (Magdalena Neuner).*

*Ketika memiliki mimpi yang sangat indah. Maka ingatlah bahwa Allah SWT memberikanmu kekuatan untuk membuatnya "Menjadi Nyata" (Dea Anjani S)*

*All our dream can come true if we have the courage to pursue them (Walt Disney).*

*Opportunities don't happen. You create them (Chris Grosser).*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan cinta, kesabaran, kekuatan, ilmu, kemudahan dan segala hal yang tidak dapat dituliskan karena sangat banyaknya. Karena Allah lah segalanya terjadi dan segalanya menjadi mudah begitu juga skripsi ini karena kemurahanNya skripsi ini selesai.
2. Ibu dan Ayahku yang sangat kucintai, sangat berharga untukku dan sangat kuhormati. Ibu dan Ayahku yang selalu ingin kubahagiakan, meskipun semua tidak akan dapat membalas kasih sayangnya, dan dengan berkat doa-doa mereka juga skripsi ini dapat selesai.
3. Teruntuk Subkhan Nur Ikhsan, terimakasih atas cinta kasih sayang dan kesabaranmu selama ini, terimakasih sampai detik ini sudah bertahan denganku dan memilihku sebagai pendampingmu, terimakasih juga sudah mau mendukungku, mendoakanku, dan turut membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Adikku Erlina Irma Febriliana semoga menjadi anak yang sholehah, sukses, berguna bagi bangsa dan selalu patuh dan berbakti pada orang tua.
5. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan bantuan yang berguna untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dalam Penulisan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNya serta kesehatan yang telah dilimpahkanNya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu tersayang yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya serta doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis.
3. Subkhan Nur Ikhsan, terimakasih atas segala kesabaran dan dukungannya, yang selalu memberikan semangat, motivasi, mendengarkan dan memberi



solusi atas setiap keluhan yang ada, dan atas doa yang diberikan kepada penulis.

4. Adik tersayang Erlina Irma Febriliana, semangat, keyakinan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. Moh. Bakti Hendrie Anto, SE., M.Sc. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ilmu-ilmu yang bapak berikan kepada penulis selama menempuh jenjang Sarjana 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya.
6. Drs Akhsyim Afandi MA.Ec., Ph.D. selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen pengajar dan staff di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. BPS ( Badan Pusat Statistika) yang menyediakan data publikasi sehingga penulis lebih mudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara yang ada di Yogyakarta dan yang ada di Jakarta terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Semua peneliti dan penulis lain yang karyanya dijadikan referensi dan membantu skripsi ini.

11. Teman-teman yang penulis kenal baik dilingkungan kampus ataupun diluar lingkungan kampus.
12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu per satu. Karena keterbatasan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Penulis,

Dea Anjani Sari

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Berita Acara Tugas Akhir .....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi .....	xi
Halaman Daftar Tabel .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstrak.....	xvii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	8

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

2.1. Kajian Pustaka.....	10
2.1.1. Penelitian Sebelumnya.....	10
2.2. Landasan Teori.....	16
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.2.2. Pembangunan Ekonomi.....	17
2.2.3. Distribusi Pendapatan.....	19
2.2.3.1. Pengertian Distribusi Pendapatan.....	19
2.2.3.2. Pembangunan dengan Pemerataan.....	20
2.2.4. Ketimpangan Antar Daerah.....	23
2.2.5. Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	25
2.2.6. Faktor-faktor Ketimpangan.....	28
2.2.7. Islam dan Ketimpangan.....	32
2.2.8. Solusi Islam Mengatasi Ketimpangan.....	33
2.2.9. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).....	36
2.2.1.0. Jumlah Penduduk.....	37

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2. Definisi Operasional.....	39

3.3. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.4. Metode Analisis Data .....	41
3.4.1. Indeks Williamson .....	42
3.4.2. Indeks Entropi Theil.....	43
3.4.3. Standar Deviasi .....	44

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Objek Penelitian .....	46
4.1.1. Nanggroe Aceh Darussalam.....	46
4.1.2. Nusa Tenggara Timur .....	54
4.2. Hasil Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Standar Deviasi.....	58
4.3. Pembahasan.....	62

#### **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Implikasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	77

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Indikator Perekonomian NAD dan NTT 2016 .....	6
1.2. Pertumbuhan Ekonomi NAD Triwulanan Tahun 2016 .....	48
1.3. Perkembangan Inflasi NAD Tahun 2016 .....	50
1.4. PDRB per Kapita NAD ADHK 2010 (Juta Rupiah) Tahun 2016 .....	53
1.5. Wilayah Administratif di Provinsi NTT Tahun 2016 .....	55
1.6. Perkembangan Inflasi NTT Tahun 2016 .....	57
1.7. Hasil Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil NAD dan NTT 2016 .	59
1.8. Hasil Standar Deviasi NAD dan NTT tahun 2016 .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
I. Tabel I. jumlah penduduk dan PDRB atas dasar harga konstan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	77
II. Tabel II. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	78
III. Tabel III. Perhitungan Indeks Entropi Theil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	80
IV. Tabel IV. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	82
V. Tabel V. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	84
VI. Tabel VI. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	86
VII. Tabel VII. Jumlah penduduk dan PDRB atas dasar harga konstan di provinsi Nusa Tenggara Timur .....	88
VIII. Tabel VII. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	89
IX. Tabel IX. Perhitungan Indeks Entropi Theil Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	91

X.	Tabel X. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	93
XI.	Tabel XI. perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	95
XII.	Tabel XII. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	97



## **Abstraksi**

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung secara seimbang dan merata. Kecenderungan peranan modal (investor) lebih memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas yang lengkap. Adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah. Kesenjangan pembangunan ekonomi antardaerah dan antarwilayah serta antarsektor ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis besar disparitas pendapatan antar daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016. Dimana hasil dari penelitian ini bisa dilihat untuk mengetahui disparitas yang terjadi di daerah atau antar daerah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, berdasarkan teori serta pendapat para ahli yang sudah bisa diterapkan pada masyarakat. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Standar Deviasi. Dari hasil perhitungan yang diperoleh selama periode pengamatan (2016) di provinsi NAD dan NTT sebagai berikut: rata-rata disparitas pendapatan per kapita di NAD dan NTT dengan menggunakan Indeks Williamson selama periode pengamatan (2016) adalah 0,03905 untuk provinsi NAD, 0,65019 di provinsi NTT. Disparitas pendapatan rata-rata per kapita oleh Indeks Entropi Theil untuk di NAD dan NTT selama periode pengamatan (2016) berturut-turut adalah 1,3759 dan 1,4098. Dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson mengalami disparitas tertinggi di provinsi NTT. Sedangkan penggunaan perhitungan Indeks entropi Theil di provinsi NTT juga mengalami disparitasnya tertinggi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketimpangan ekonomi mengandung makna pada persoalan kemiskinan dan pemerataan. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan dalam menilai ketimpangan ekonomi antara lain adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada serta proses kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja guna menunjang kegiatan ekonomi. Pembangunan suatu daerah diacu dari pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah menetapkan tingkatan laju pertumbuhan yang tinggi untuk perencanaan dan tujuan pembangunan di daerahnya. Perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan perekonomiannya lebih tinggi dari pada pencapaian sebelumnya.

Perihal utama dalam pembangunan daerah adalah daerah tersebut mampu mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, dan menganalisis apakah memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan ekonomi juga membuat kecemburuan sosial dimana masyarakat kelas menengah bawah merasa tidak adilnya pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang dianggap hanya

menguntungkan sepihak. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlunya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merata. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan memperhitungkan PDRB dan jumlah penduduk di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berpengaruh terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Menurut Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya memiliki sedikit manfaat dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut *trickle down effect* dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara miskin dan berkembang.

Ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Pandangan tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Shankar dan Shah (2008), bahwa ketimpangan antar daerah merupakan suatu perkembangan yang selalu ada di berbagai negara, terutama bagi negara dengan geografi dan wilayah yurisdiksi

yang luas. Hal ini memperjelas bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah merupakan masalah universal, karena pada tingkat apapun kesenjangan selalu ada, dikarenakan oleh perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Kuznet membuktikan hal itu, yaitu dalam analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara maju ditemukan bahwa pada tahap pertumbuhan awal distribusi awal cenderung memburuk, namun dalam tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (Kuncoro, 2014). Hipotesis tersebut dikenal sebagai hipotesis “U-Terbalik” Kuznet.

NAD sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kabupaten yang ada di provinsi NAD terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diamati, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan pembangunan tersebut kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan.

Dalam sejarahnya, masyarakat NAD telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat NAD tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Dengan berlandaskan kepada Qanun NAD Nomor 10 tahun 2007 tentang *Baitul Mal* bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab. Kemudian NAD dikenal sebagai *Serambi Mekkah* karena dari wilayah inilah kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

NTT adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada dalam gugusan sunda kecil dan termasuk dalam kepulauan Nusa Tenggara. Saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah 21 kabupaten, dan jumlah kota yang ada di NTT adalah 1 kota. Wilayah ini menyimpan berbagai keunggulan untuk diberdayakan misalnya sumber daya alam yang berlimpah yang mana sesungguhnya sangat potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Namun sumber daya manusia yang tersedia di kawasan ini sangat terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menggali potensi yang ada, inilah yang disebut "*kaya tetapi miskin*", artinya bahwa

sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengolahannya masih sangat minim atau belum optimal.

Adapun beberapa kendala atau indikator yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, yang pertama adalah begitu luasnya kawasan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang sangat rendah, kedua keaneka-ragaman masyarakat dan kultural dengan tingkat penguasaan informasi dan teknologi yang rendah, ketiga rendahnya tingkat pendidikan, melek huruf dan akses atas pendidikan tinggi, keempat adalah tingkat pendapatan per kapita yang masih rendah. Sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tidaklah dengan sendirinya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumber daya manusia yang ada tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumber alamnya. Sebaliknya, sebuah wilayah yang miskin sumber alam, namun cakap dalam mengembangkan teknologi, ternyata lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah lainnya yang tidak cukup mempunyai sumber daya alam dan manusia yang unggul.

**Tabel 1.1**

**Indikator Perekonomian di Provinsi NAD dan NTT**

<b>Pembeda</b>	<b>Nanggroe Aceh Darussalam</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>
Kandungan sumber daya alam	Pabrik semen Andalas, pupuk AAF, minyak, Emas, Perak	Semen kupang, mangan, minyak cendana
Jumlah Penduduk	4.906.720 jiwa	5.203.514 jiwa
Luas Wilayah Daratan	57.365,67 km <sup>2</sup>	47.349,90 km <sup>2</sup>
Letak Geografis	01° 58' 37,2" - 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6" - 98° 17' 13,2" Bujur Timur	8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur.
Jumlah Kabupaten/Kota	18 kabupaten dan 5 kota	21 kabupaten dan 1 kota

Sumber : BPS, NTT dan NAD 2016

Tabel 1.1 menunjukkan dua daerah yang dipilih sebagai daerah penelitian mempunyai perbedaan, baik dari segi lokasi, jumlah penduduk, agama dan budaya, maupun perkembangan ekonomi dan sosial. Sengaja diambil daerah dengan latar belakang berbeda agar dapat diketahui apakah ada perbedaan distribusi pendapatan antara provinsi NAD dan NTT. Asumsi yang diajukan dalam pengambilan daerah penelitian yang berbeda adalah bahwa daerah yang Islam (syariat Islam kuat) tidak mengalami ketimpangan atau distribusi merata. Berarti daerah yang Islamnya kuat distribusi pendapatan merata dibandingkan dengan tidak Islam. Berdasarkan penjelasan

diatas, perlu kajian serta analisis tentang ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi NAD dan NTT dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Indonesia: Perbandingan Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2016**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2016 ?
2. Bagaimana tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2016.
2. Menganalisis tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.



#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi penulis sendiri, dengan harapan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan disamping pemahaman tentang teori dan konsep yang telah diperoleh dalam perkuliahan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan daerah khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi pembangunan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Isi dari pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian pustaka merupakan pengkajian dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan landasan teori digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Kerangka penelitian berfungsi sebagai penjelasan alur dari inti penelitian ini. Serta hipotesis guna dugaan sementara yang penulis dapatkan dari penelitian terlebih dahulu, teori dan analisis sementara yang penulis gunakan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, definisi operasional, metode pengumpulan data, metode analisis data dan cara pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini terdapat dua sub bab yaitu diskriptif data penelitian yang berupa data yang digunakan dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan hasil analisis yang dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran berisi solusi yang ditawarkan untuk perbaikan kedepan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Penelitian Sebelumnya**

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel serta analisis dalam penelitian ini, maka perlu kiranya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang ketimpangan distribusi pendapatan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat daerah.

Lyndon (2001) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan data tahun 1980-1996 untuk 26 provinsi di Indonesia. Variabel yang digunakan sebagai ukuran kesenjangan pendapatan yaitu indeks gini, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas, proporsi anggota rumah tangga terdidik, proporsi jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor industri, pertumbuhan pendapatan nasional dan distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Estimasi yang digunakan adalah model GLS dengan menggunakan *fixed effect*, dengan hasil berikut :

1. Kenaikan penduduk pada usia 60 tahun ke atas secara signifikan menurut kesenjangan pendapatan, karena penduduk usia lanjut

mayoritas berada pada kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas.

2. Kenaikan proporsi rumah tangga yang bekerja disektor industri akan berkontribusi meningkatkan kesenjangan pendapatan rumah tangga, karena adanya kesenjangan tingkat upah yang cukup tinggi antar pekerja yang bekerja sebagai manajer, teknisi, dan yang memiliki keahlian tinggi.
3. Kenaikan proporsi penduduk yang bekerja dan terdidik akan meningkatkan kesenjangan pendapatan rumah tangga karena ketidakmerataan distribusi pendidikan di daerah tersebut.
4. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurunkan kesenjangan pendapatan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori Kuznet yang menyatakan bahwa pada awal tahap pembangunan, kesenjangan pendapatan akan meningkat seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkatan pertumbuhan tertentu, kesenjangan pendapatan akan semakin menurun walaupun pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Metode *Generalized Least Square* (GLS) memiliki nilai lebih dibandingkan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi parameter regresi. Metode OLS yang umum tidak mengasumsikan bahwa varians error adalah homoskedas, pada kenyataannya variasi data pada data khususnya data

time series cenderung *homogeny* (heteroskedas). Metode *GLS* sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independen secara eksplisit.

Wijaya (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan data PDRB dan menerapkan koefisien Indeks Williamson yang dibobot. Ia memperkirakan tingkat perbedaan pendapatan regional untuk tahun 1968-1972. Menurut tulisan yang merupakan perintis ini, Indeks Williamson dari tahun tersebut meningkat tajam dari 0,571 menjadi 0.945 jika semua pendapatan dimasukkan, tetapi jika pendapatan dari minyak bumi dikeluarkan dari PDRB provinsi-provinsi yang kaya minyak (seperti Riau dan Kalimantan Timur) maka angka-angka itu antara 0,34 sampai 0,552. Ia menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi juga mempunyai biaya hidup yang lebih tinggi, sehingga kalau PDRB per kapita dikoreksi berdasarkan perbedaan-perbedaan harga, indeks ketidakmerataan tersebut akan banyak merosot.

Sutarno dan Kuncoro (2003) melakukan penelitiannya mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan Tipologi Daerah, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Hipotesis Kuznets dan Korelasi Pearson. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam periode pengamatan 1993-2000, terjadi kecenderungan peningkatan kesenjangan, baik dianalisis dengan Indeks Williamson maupun dengan Indeks Entropi Theil.

Berdasarkan tipologi daerah, daerah/kecamatan di kabupaten Banyumas dapat diklarifikasikan dijadikan empat kelompok daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah yang berkembang cepat, dan daerah yang relatif tertinggal. Dalam penelitian ini hipotesis kurva U-Terbalik Kuznets berlaku di kabupaten Banyumas. Sedangkan berdasarkan perhitungan analisis Korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, didapatkan bahwa ada korelasi yang kurang kuat.

Kuncoro (2004) dalam penelitiannya mengenai pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Menggunakan data primer dan data sekunder, dengan (Y) ketimpangan pendapatan, (X1) pertumbuhan ekonomi, (X2) kesempatan kerja, (X3) kemiskinan. Alat analisis menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan panel data. Hasil yang diperoleh yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo provinsi Jambi positif dan tidak signifikan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo provinsi Jambi negatif dan tidak signifikan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Bungo provinsi Jambi positif dan tidak signifikan.

Pangaribuan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Blora menggunakan Analisis Shift Share, LQ, dan Index Williamson untuk mengukur PDRB, PDRB/kapita, jumlah penduduk, sektor basis, sektor non basis. Menurut Bosman berdasarkan analisis Indeks Williamson, Kabupaten Blora dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan. Indeks Williamson menunjukkan rata-rata 0,314 selama tahun pengamatan. Angka ini masih di bawah ambang kritis 0,5.

Suryadarma, dkk (2005) dalam penelitiannya berjudul *A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ketimpangan pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan saat terjadi krisis, serta menguji apakah ketimpangan berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini memberikan gambaran yaitu tentang ketimpangan di Indonesia selama periode tahun 1984 hingga 2002 dengan menggunakan beberapa pengukuran ketimpangan yaitu Gini Rasio, *Generalized Entropy (GE) Index*, dan Atkinson Index. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ketika terjadi krisis semua metode pengukuran menunjukkan penurunan ketimpangan, namun sebenarnya terjadi peningkatan tetapi di bawah garis kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan adanya penjelasan penting yaitu bahwa tingkat kemiskinan menurun dengan cepat antara tahun 1999 dan 2002,

yang disebabkan karena ketimpangan selama krisis pada tahun 1999 berada pada tingkat paling rendah.

Coto (2006) dalam tesisnya yang berjudul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Output Sektor Industri, Upah Minimum dan Tingkat pendidikan terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia* menggunakan metode estimasi *fixed effect* yang memungkinkan perbedaan tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga pada setiap provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 1993, 1996, dan tahun 1999 dengan data cross section 26 provinsi di Indonesia tidak termasuk Timor-Timur.

Hartono (2008) dalam tesis nya berjudul *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah* menggunakan data primer dan data sekunder, dengan (Y) timpangan pembangunan ekonomi, (X1) Investasi, (X2) Angkatan Kerja, (X3) Dana Alokasi Bantuan. Alat analisis menggunakan metode uji statistik t, Uji statistik dan regresi berganda. Hasil yang diperoleh yaitu variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Nilai F hitung sebesar 1,899 dengan angka signifikan sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ).

Masli (2009) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat* menggunakan Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, dan Tipologi Kleisen. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami fluktuasi dan menunjukkan arah negatif jika dibandingkan pada awal penelitian. Menurut Tipologi Klaisen, pada umumnya kabupaten/kota di Jawa barat termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal. Sedangkan menurut Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil kesenjangan atarkabupaten/kota meningkat.

Safrida, dkk (2011), dalam penelitiannya yang berjudul *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar* menggunakan data primer dan data sekunder, dengan sampel penelitian 45 orang sampel. Gini rasio dan kriteria Bank Dunia sebagai metode dalam menganalisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Hasil yang di peroleh yaitu Indeks Gini di kabupaten Peukan Bada sebesar 0,386 yang berarti ketimpangan distribusinya sedang. Sementara itu, kriteria Bank Dunia, secara keseluruhan Kecamatan Peukan Bada masih kurang merata (ketimpangan sedang) hal ini ditunjukkan oleh 40 % penduduk pendapatan rendah menerima 11,4 % pendapatan pertahun.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, jadi persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada

kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Para teoritis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sama-sama menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Pertumbuhan digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertumbuhan pendapatan nasional riil (Sukirno, 2004).

Dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output dan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak dan lebih efisien. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru kerana semakin bertambahnya jumlah penduduk. Ada perkembangan atau pembangunan ekonomi kalau tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian di samping kenaikan output. Jadi, perkembangan atau

pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan (Sukirno, 2004).

### **2.2.2. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Ada beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Para ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan. Dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus menerus meningkat, kalau pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita (Sukirno, 2004).

Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Todaro, 1999). Adapun manfaat pembangunan yaitu dengan adanya pembangunan ekonomi, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi. Memberikan kemampuan yang lebih besar kepada

manusia untuk menguasai alam dan mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Dapat diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi dapat mengurangi perbedaan antara kaum kaya dengan kaum miskin. Jadi ekonomi pembangunan atau ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi tidak hanya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi saja, tetapi juga menganalisa hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan tersebut.

### **2.2.3. Distribusi Pendapatan**

#### **2.2.3.1. Pengertian Distribusi Pendapatan**

Distribusi Pendapatan Nasional adalah menentukan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999).

Distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu: distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).

Dari dua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

Menurut (Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang (NSB) :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah akan tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi suatu barang dan jasa.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah tertentu.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal *Capital Incentive*, sehingga menyebabkan persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran akan bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial di suatu daerah.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar *term of trade* bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB.

8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

### **2.2.3.2. Pembangunan dengan Pemerataan**

Perubahan ekonomi di samping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000).

#### **1. Argumen Tradisional**

Argumen tradisional lebih mengfokuskan dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibatnya pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan bahwa mereka tidak begitu memperhatikan penting dan tidaknya masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses

pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal tersebut dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui mekanisme persaingan penyesuaian kebawah secara alamiah.

## 2. Argumen Tandingan

Karena banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomorduakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu:

1. Ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Beberapa faktor ini secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.
2. Berdasarkan observasi yang ditunjang oleh data-data empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat

diharapkan kemampuan atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik.

3. Rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi dan pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
4. Upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang meningkatkannya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.
5. Tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera menciptakan banyak insentif atau rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.



#### **2.2.4. Ketimpangan antar Daerah**

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat, dan antar daerah dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, disebabkan adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Williamson, 1965). Ketimpangan yang sering dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pada dasarnya mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja dan tingkat ketimpangan sangat tinggi (Kuncoro, 1997:103).

Williamson (1965) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara ketimpangan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan sedang berkembang. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah tertentu saja. Pada tahap yang lebih matang, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak ada keseimbangan antardaerah dan ketimpangan berkurang dengan signifikan.

Adanya perbedaan kemajuan antar daerah dijelaskan Myrdal dalam teorinya, Myrdal berpendapat pembangunan ekonomi proses sebab dan penyebab sirkuler yang menyebabkan orang kaya mendapat keuntungan yang semakin banyak dan untuk mereka yang tinggal di belakang akan semakin terhambat. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan

akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Jhingan, 1990).

#### **2.2.5. Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antarwilayah sangat ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Kebijakan yang dimaksudkan merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara atau wilayah (Sjarizal, 2002):

##### **a. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan**

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah. Pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antardaerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan

ekonomi antarwilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar.

b. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

c. Pengembangan Pendidikan Antarwilayah

Pengembangan pendidikan akan dapat mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, melalui pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong proses inovasi dan perbedaan teknologi produksi selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha. Pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang diperkirakan akan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

d. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep Konsentrasi dan Desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan masih mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antardaerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah.

e. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Bila ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi. Melalui kebijakan. Pemerintah dapat memberikan kewenangan yang

lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerah masing-masing (desentralisasi pembangunan). Sejalan dengan ini, masing-masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk *Block Grant* berupa dana perimbangan. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan akan dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembangunan ekonomi daerah dapat lebih ditingkatkan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat dikurangi.

#### **2.2.6. Faktor-faktor Ketimpangan**

Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah aspek yang umum terjadi di dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan berbagai faktor yang terdapat di masing-masing daerah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan daerah juga menjadi berbeda. Menurut Myrdal (1957), dalam perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan

cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah (Manik, 2009:23) yaitu :

#### 1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti: minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya. Ada daerah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tetapi daerah tidak ada. Berbeda halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

#### 2. Perbedaan Kondisi Demografi

Perbedaan kondisi demografi dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah dikarenakan hal ini akan mempengaruhi

produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan persediaan lapangan kerja yang potensial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang baik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah. kondisi demografi juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

### 3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah transmigrasi atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi di suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat

membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung meningkat, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas di dalam suatu daerah, seperti : jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-lain.

#### 4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah yang terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat naik. Apabila konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, pemerataan fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara. Ketiga, kondisi demografi juga turut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

#### 5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah



Alokasi dana bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan antardaerah cenderung meningkat. Akan tetapi sebaliknya bilamana sistem pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung lebih menurun. Keuntungan alokasi ditentukan dari biaya transport baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan penyewaan tanah. Oleh karena itu investasi akan lebih cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

### **2.2.7. Islam dan Ketimpangan**

Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua ranah sekaligus, keadilan secara umum bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Keadilan secara khusus bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antar satu orang dengan yang lain. Karena itu salah satu keistimewaan penting dalam

sistem ekonomi Islam adalah pengaturan perilaku rakyat dan pemerintah yang meliputi dua hal materi dan spiritual sekaligus. Sebab dalam Islam, tujuan utama adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan ruhani dan spiritual (Abdurrahman, 2004). Dalam sistem ekonomi Islam mekanisme yang dijalankan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan itu. Dua dimensi materi dan spiritual itu nampak jelas dalam ajaran Islam yang melarang monopoli, penimbunan harta dan perintah mengeluarkan zakat dan sedekah. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr/59:7.

Di antara masalah terpenting yang mendapat perhatian Islam adalah pembagian kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Dalam pembagian kekayaan ini ada keniscayaan untuk menerapkan keadilan, penyusunan kebijakan dan campur tangan pemerintah Islam dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam selain kepemilikan pribadi ada juga kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Tentunya, apa saja yang dimiliki oleh negara akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pembiayaan pengelolaan suatu negara.

Ada pula kekayaan yang dimiliki umum seperti hutan, laut, danau, gunung dan lainnya yang menurut Islam adalah milik umum. Hal-hal tadi tidak berada dalam kepemilikan negara. Negara hanya berfungsi sebagai pengawas dan pengatur pemanfaatannya, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, kekayaan ini tidak jatuh dalam monopoli segelintir orang tertentu.

### **2.2.8. Solusi Islam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi**

Persoalan ketimpangan tidak hanya menyangkut masalah pendapatan dan kekayaan. Ketimpangan pada akhirnya adalah mengenai kekuasaan. Ketimpangan ekonomi menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam hal siapa yang membuat aturan, siapa yang menguasai modal dan sumber daya. Ketidakseimbangan kekuasaan yang berakibat pada ketimpangan yang lebar antara kelompok kaya dan kelompok lain semakin melanggengkan ketimpangan. Pasalnya, mereka yang berada di atas memiliki akses istimewa dan pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dimanfaatkan agar perekonomian dan berbagai kebijakan dapat melayani kepentingan. Adapun kepentingan orang-orang yang berada di bawah cenderung tidak dihiraukan. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakstabilan sosial. Pasalnya, ruang politik dan ekonomi digunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir orang daripada kepentingan banyak orang (Oxfam, 2016).

Pada dasarnya jika kita kembalikan persoalan ketimpangan ekonomi dalam pandangan sistem ekonomi Islam sebenarnya disebabkan karena buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Dan hal itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam politik ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan keamanan) dijamin oleh negara. Jika seseorang

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. Jika tidak mencukupi, diambilkan dari harta zakat. Jika belum mencukupi, kewajiban itu beralih ke negara. Negara bisa memberikan bantuan langsung maupun dengan memberi pekerjaan. Semua potensi kekayaan alam yang menjadi sumber pendapatan penting negara akan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam Islam, barang-barang tambang yang melimpah seperti emas, perak, timah, batu bara, minyak dan gas adalah milik rakyat yang disebut *Milkiyah 'Amah* sehingga tidak boleh diberikan kepada individu, swasta apalagi asing (An-Nabhani, 1990). Kekayaan alam milik umum ini harus dikelola negara dengan baik, amanah, transparan, profesional dan penuh tanggung jawab. Seluruh hasilnya untuk kepentingan rakyat.

Salah satu contoh, kesejahteraan rakyat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tergambar dari ucapan Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu, "Saat hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan." Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang sah. Sistem ini menyediakan kehidupan yang aman dan baik untuk pihak yang kuat maupun yang lemah, kaya maupun miskin. Dengan sistem itu mereka semuanya akan menjadi hamba-hamba Allah SWT yang saling

bersaudara. Sesungguhnya sistem ini akan membuat baik kondisi umat manusia (Firdaus, 2003).

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bisa menjadi solusi bagi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan tentu saja tidak bisa secara parsial, namun harus lewat perubahan sistem yang menyeluruh. Caranya adalah dengan mengganti sistem kapitalisme yang menjadi penyebab utama ketimpangan dan kemiskinan masyarakat dengan sistem Islam. Di sinilah kecemerlangan Islam dalam menuntaskan problem ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Artinya, Islam tidak memandang bahwa kemiskinan merupakan urusan individu semata, tetapi melibatkan negara dan sistemnya.

#### **2.2.9. Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau bisa dikatakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB per kapita sendiri diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

Dalam perhitungan nilai PRDB dapat dilakukan dengan dua macam dasar harga, yaitu:

1. PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga konstan berfungsi dalam melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
2. PRDB atas dasar harga berlaku yaitu PDRB yang dihitung dengan dasar harga berlaku pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga yang berlaku digunakan untuk melihat perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut.

Prestasi ekonomi suatu bangsa atau negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Pendapatan Nasional tidak hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu bangsa dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan negara lain. Dikenal beberapa ukuran pendapatan nasional, diantaranya: *Gross National Product (GNP)* atau Produk Nasional Bruto (PNB), *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto, *Net National Product (NNP)* atau Produk Nasional Neto (PNN), dan *National Income (NI)* atau Pendapatan Nasional (PN) (Dumairy, 1996).

Menurut Gillis *et al.* dalam Hendra (2004), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah penjumlahan nilai produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama jangka waktu tertentu (satu tahun) tanpa menghitung nilai produk antara, dalam penghitungannya mengeluarkan pendapatan warga

negara yang berada di luar negeri, dan memasukkan seluruh produksi dalam negeri termasuk pendapatan yang diterima warga negara asing. PDB diangkat regional menjadi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

#### **2.2.1.0. Jumlah Penduduk**

Menurut Sukirno, (1997) perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat didalam pembangunan. Dapat dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan, lalu terjadinya perluasan pasar dimana terjadi perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting diantaranya yaitu, pendapatan masyarakat dan juga jumlah penduduk. Dan penduduk bisa disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan didalam hidupnya.

Jumlah penduduk yang terus membesar adalah sebagai sebab terjadinya kemiskinan yang semakin meluas, tinggi dan rendahnya jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh proses demografi yakni dari kelahiran, kematian dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah pasti akan meningkatkan pertumbuhan penduduk, namun banyak dari tingkat kelahiran yang tinggi berasal dari penduduk golongan miskin. Pertumbuhan penduduk

sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki dalam aspek-aspek dan komponen demografi seperti migrasi, fertilisasi, dan mortalitas akan membantu dalam angka pengambilan kebijakan dan perencanaan program untuk dapat mengembangkan program pembangunan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tepat sasaran.

Menurut Arsyad, (2004) terdapat tiga ciri-ciri pokok yang menjadi tanda-tanda perkembangan serta permasalahan yang terjadi didalam kependudukan Indonesia, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk yang kurang seimbang antar daerah dan yang terakhir adalah kualitas hidup penduduk yang sangat perlu ditingkatkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data dikumpulkan dari beberapa sumber antara lain Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya. Data digunakan adalah :



1. Data PDRB menurut harga konstan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2016.
2. Data PDRB menurut harga konstan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016.
3. Data jumlah penduduk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun (NAD) 2016.
4. Data jumlah penduduk di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016.

### **3.2. Definisi Operasional**

Mencegah kekaburan pengertian dari masing-masing variabel dalam hipotesa maka akan dikemukakan definisi konsep dari masing-masing variabel tersebut. Adapun pengertian tentang variabel penelitian berdasarkan pendapat Sugiyono (2006:42-43) adalah suatu sifat atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel (Sugiyono:43) yaitu:

#### **a. PDRB**

Data PDRB Atas Harga Konstan di provinsi NAD dan NTT dalam satuan jutaan rupiah, data tersebut diperoleh dari sistem informasi dan manajemen data regional yang dikelola oleh BAPPENAS yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik.

#### **b. Jumlah Penduduk**

Dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk tahun 2016 di provinsi NAD dan NTT, data yang diperoleh dari sistem informasi dan manajemen data regional yang dikelola oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang disajikan oleh Badan Pusat Statistika.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian ini seluruhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh dari literature yang berkaitan baik berupa dokumen artikel catatan arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan kemudian diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini seluruhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, sehingga tidak diperlukan teknik kuesioner. Periode data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tahun 2016. Secara umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) nasional maupun daerah, buku-buku, jurnal penelitian, serta *browsing website internet* yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiono, 2009).

Variabel dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi yaitu antara provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2016. Analisis tingkat Ketimpangan Antar daerah yaitu menggunakan metode analisis: Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Standar Deviasi. Analisis ini digunakan untuk melihat besaran ketimpangan pendapatan antar wilayah untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto di provinsi. Indeks ketimpangan tersebut dapat dibagi menjadi dua sub indikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional (Kuncoro, 2004).

### 3.4.1. Indeks Williamson

Indeks Williamson yang dikenal dalam tulisannya pada tahun 1965 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Dalam metode ini diperoleh dari perhitungan per kapita dan jumlah penduduk di suatu negara/daerah.

Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{2\sqrt{\sum((Y_i - Y)^2 \cdot f_i/n)}}{Y}$$

Dimana :

- IW : Indeks Williamson
- $Y_i$  : PDRB per kapita di kabupaten i
- Y : PDRB per kapita Provinsi
- $F_i$  : Jumlah penduduk di kabupaten i
- n : Jumlah penduduk provinsi

Besarnya Indeks Williamson ini akan bernilai Positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai Indeks ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai Indeks ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.

Kriteria untuk menetapkan dan mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ketimpangan itu tinggi, sedang ataupun rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut (BPS, Pemerataan pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk NAD dan NTT, 2000).

- a. Bila  $IW, < 0,3$  artinya : ketimpangan ekonomi wilayah rendah
- b. Bila  $IW, 0,3 - 0,5$ , artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang
- c. Bila  $IW, > 0,5$  artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

Namun dalam analisis Indeks Williamson ini mempunyai kelemahannya yaitu penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global dan berapa besar bagian yang diterima oleh suatu kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

### 3.4.2. Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi. Adapun cara menghitung Indeks Entropi Theil dapat dilakukan dengan cara (Kuncoro,2004:134)

Secara sistematis perhitungan Indeks Entropi Theil sebagai berikut:

$$I = \sum \left( \frac{Y_j}{Y} \right) \log \left( \frac{Y_j/Y}{X_j/X} \right)$$

Dimana :

I : Indeks Entropi Theil

$Y_j$  : PDRB per kapita kota/kabupaten j

$Y$  : PDRB per kapita Provinsi

$X_j$  : Jumlah penduduk kota/kabupaten j

$X$  : Jumlah penduduk provinsi

$I = 0$  = Mendekati 0, berarti ketimpangan semakin kecil (merata)

$I = 1$  = Mendekati 1, berarti ketimpangan semakin besar (tidak merata)

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai Indeks Entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai Indeks Entropi Theil maka semakin merata (umiyati, 2012). Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengetahui Ketimpangan antar wilayah dan di dalam wilayah.

### **3.4.3. Standar Deviasi**

Menurut Suhardi dan Purwanto (2009) Standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrem, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi, sama halnya seperti mean.

Standar Deviasi memiliki beberapa karakteristik khusus lainnya. Standar Deviasi tidak berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya di tambahkan atau dikurangkan dengan nilai konstan tertentu. Standar Deviasi

berubah apabila setiap unsur pada gugus datanya dikali/dibagi dengan nilai konstan tertentu (Sudjana, 1991). Bila dikalikan dengan nilai konstan, standar deviasi yang dihasilkan akan setara dengan hasil kali dari nilai standar deviasi aktual dengan konstan.

Rumus untuk menghitung Standar Deviasi sebagai berikut:

$$S = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}{n - 1}$$

Dimana :

S : Standar Deviasi

$X_i$  : Nilai X

$\bar{X}$  : Rata-rata nilai X

n : Ukuran sampel

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **4.1.1. Nanggroe Aceh Darusalam**

Provinsi NAD terletak antara  $01^{\circ} 58' 37,2''$  -  $06^{\circ} 04' 33,6''$  Lintang Utara dan  $94^{\circ} 57' 57,6''$  -  $98^{\circ} 17' 13,2''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Sebelah Utara Selat Malaka, Sebelah Selatan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Timur Selat Malaka, Sebelah Barat Samudera Indonesia. Pada tahun 2012 Provinsi NAD dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa. Batas-batas wilayah Provinsi NAD, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

Luas Provinsi NAD 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi NAD



ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (PLG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

Kinerja ekonomi NAD pada triwulan tercatat pada tabel 1.2 tumbuh sebesar 2,22% *Year of Year* (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelum sebesar 3,31%. Pertumbuhan ekonomi aceh tanpa migas juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi tanpa Migas NAD tumbuh sebesar 3,31% (yoy) atau turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,24% secara tahunan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,24% (yoy).

**Tabel 1.2****Pertumbuhan Ekonomi NAD Triwulanan Tahun 2016**

Sektoral (Rp Triliun)	2016		
	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	7,90	7,84	2,05
Pertambangan & Penggalian	2,27	1,89	(14,16)
Industri Pengolahan	1,54	1,51	(2,38)
Pengadaan Listrik, Gas	0,04	0,04	5,24
Pengadaan Air	0,01	0,01	4,61
Konstruksi	2,81	2,92	16,10
Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,44	4,61	0,02
Transportasi & Pergudangan	2,25	2,34	(1,80)
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,33	0,34	8,84
Informasi & Komunikasi	1,08	1,09	1,94
Jasa Keuangan	0,48	0,48	19,69
Real Estate	1,08	1,09	6,48
Jasa Perusahaan	0,17	0,18	9,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,60	7,01
Jasa Pendidikan	0,63	0,65	3,09
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,80	0,81	2,92
Jasa lainnya	0,38	0,39	8,90
PDRB	28,42	28,78	2,22
PDRB Non Migas	26,78	27,54	3,31

Sumber : BPS provinsi NAD, Diolah

Secara sektoral, penurunan pertumbuhan ekonomi NAD tersebut bersumber dari menurunnya kinerja di sektor-sektor utama NAD, yakni sektor pertanian, perdagangan, administrasi pemerintahan. Sektor pertanian

mengalami penurunan pertumbuhan baik dibandingkan dengan tahun maupun triwulan sebelumnya. Pada triwulan II-2016, tercatat pertumbuhan sektor terbesar di NAD tersebut tumbuh sebesar 2,42% (yoy), turun dari periode triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Namun demikian, penurunan di sektor-sektor tersebut dapat tertahan oleh pertumbuhan dari sektor konstruksi serta menurunnya kedalaman kontraksi sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sektor konstruksi pada triwulan laporan tercatat mengalami pertumbuhan yang positif pada level 16,10% (yoy), naik dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun sebelumnya yang berkontraksi. Sebesar 0,02% (yoy).

Dari sisi permintaan, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan disebabkan oleh adanya penurunan di hampir semua komponen-komponen utama permintaan. Penurunan tersebut termasuk pada komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen-komponen terbesar yang menyusun perekonomian NAD di sisi permintaan. Secara tahunan, komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan sebesar 11,79% (yoy), konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar 13,25% (yoy), konsumsi LNRT mengalami pertumbuhan sebesar 9,46% (yoy), sedangkan komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 2,52% (yoy).

Perekonomian NAD pada triwulan IV-2016 diperkirakan akan tumbuh antara 2,26% dan 3,26% dan secara keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mengalami pertumbuhan antara 2,4% dan 3,4%. Sumber pertumbuhan ekonomi NAD pada triwulan-IV 2016 diperkirakan akan berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi seiring dengan peningkatan konsumsi menjelang persiapan pilkada serentak 2017 serta realisasi belanja proyek pemerintah. Sementara itu, dari sisi penawaran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan masih menjadi sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi NAD di tengah risiko penurunan harga komoditas dunia.

**Tabel 1.3**

**Perkembangan Inflasi NAD Tahun 2016**

Kota	YOY,%										
	I-15	II-15	III-15	IV-15	I-15	II-15	III-15	IV-15	I-16	II-16	III-16
Banda Aceh	5,40	6,12	4,30	1,27	5,40	6,12	4,30	1,27	3,10	2,10	3,17
Lhokseumawe	5,44	6,36	4,55	2,44	5,44	6,36	4,55	2,44	4,63	3,03	4,79
Meulaboh	5,67	6,45	2,86	0,58	5,67	6,47	2,86	0,58	3,12	2,19	3,81
NAD	5,45	6,24	4,19	1,53	5,45	6,24	4,19	1,53	4,45	2,34	3,73

Sumber : BPS NAD, Data Diolah

Secara tahunan, laju inflasi Provinsi NAD pada triwulan III 2016 mencapai 3,73% (yoy), menurun dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,19% (yoy). Namun demikian, Inflasi tahunan NAD pada triwulan III 2016 lebih tinggi daripada inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,07% (yoy). Sejalan dengan inflasi bulanan dan

triwulanan, tekanan inflasi pada periode ini didorong oleh kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, serta kelompok sandang. Di sisi lain, sebagai penahan laju inflasi tahunan di bulan Juni 2016, terdapat deflasi untuk kelompok, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Deflasi ini terjadi terutama disebabkan adanya penyesuaian atau penurunan tarif angkutan dan pengiriman barang oleh karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga bahan bakar bensin dan solar per tanggal 1 April 2016.

Berdasarkan disagregasinya, laju inflasi NAD pada triwulan III-2016 untuk komoditas *Core* dan *Volatile Food* secara *year on year* masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 2,44% (yoy) dan 12,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy) dan 6,20% (yoy). Sedangkan untuk kelompok *Administered Prices* tercatat mengalami deflasi sebesar 1,30% (yoy) di triwulan laporan, meningkat dibandingkan dengan deflasi kelompok *administred price* di triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,70%. Menurut kontribusinya tekanan inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok *volatile food*. Komoditas pada kelompok ini yang memberikan andil inflasi tinggi antara lain Cabai Merah, Beras, Ikan Segar, dan Tongkol. Selain itu inflasi tahunan NAD pada triwulan laporan juga disumbang beberapa komoditas dari kelompok *administered price* yaitu rokok kretek dan rokok kretek filter.

Pada akhir tahun 2016, inflasi NAD diperkirakan akan meningkat pada kisaran 2,96% - 3,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi NAD pada triwulan IV-2015 sebesar 1,53%. Penyesuaian harga BBM pada bulan April 2016 terkait perkembangan harga minyak dunia yang cenderung menurun telah mengurangi tekanan inflasi. Namun demikian, risiko cuaca buruk di akhir tahun dan kurangnya pasokan cabai menjadi isu yang harus dimitigasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi. Pembangunan suatu daerah dapat diacu melalui pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu daerah didasari dari tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk perencanaan dan tujuan pembangunan di daerah. Setiap daerah menetapkan tingkatan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerahnya.

Ketimpangan ekonomi dapat dilihat melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan 2010 di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**PDRB Per Kapita NAD Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)**

Kabupaten/kota	2014	2015	2016
Aceh Singkil	1433172.18	1488739.02	1538874.82
Aceh Selatan	3432178.66	3577877.65	3743403.8
Aceh Tenggara	2810303.31	2925061.03	3053444.93
Aceh Timur	7727472.49	7265485.79	6827576.6
Aceh Tengah	4770082.47	4970492.37	5174300.3
Aceh Barat	4940842.67	5151377.64	5315210.5
Aceh Besar	8186702.8	8516059.89	8858410.2
Aceh Utara	17218546.12	15241599.91	15347961
Aceh Barat Daya	2427765.02	2508888.89	2623870
Aceh Tamiang	5001671.77	5145111.81	5280861.3
Aceh Jaya	1651201.33	1718899.9	1783046.6
Simeulue	1292864.83	1353913.76	1409970.4
Pidie	6296490.19	6604680.42	6853560.14
Bireuen	8171310.73	8473559.83	8830808.41
Gayo Lues	1654168.85	1717854.62	1790153.03
Nagan Raya	5181129.58	5382709.57	5663668.01
Bener Meriah	2933323.5	3078471.95	3206536.5
Pidie Jaya	2077390.74	2180882.69	2260711
Banda Aceh	12119047.34	12725924.07	13528294.8
Sabang	874079.17	908358.57	957238.6
Langsa	3113491.08	3255001.92	3391382.6
Lhokseumawe	8347714.38	6859830.96	6462392
Subulussalam	1087849.55	1142556.54	1198938.44
Provinsi Aceh	112748798.8	112193338.8	115100614

Sumber : BPS, Provinsi NAD

Pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan dapat dilihat dari nilai PDRB Per Kapita provinsi NAD atau kabupaten/Kota di provinsi NAD, nilai PDRB untuk Provinsi NAD atas dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar 112748798,8 tahun 2015 turun menjadi 112193338,8 dan tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 115100614. Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NAD nilai PDRB tertinggi Kabupaten Aceh Utara sebesar 17218546,12.

#### **4.1.2. Nusa Tenggara Timur**

NTT adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Diantara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk wilayah Kabupaten Flotim/ Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebaby, Sebabyur Kecil, Sebabyur Besar Serayu Besar (Wilayah Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll. Dari seluruh pulau yang ada, 42 pulau telah berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni. Di NTT terdapat tiga pulau besar, yaitu pulau Flores, Sumba dan



Timor, selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar, komoditas yang dimiliki sangat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh iklim.

Luas wilayah daratan kira-kira 47.349,90 km<sup>2</sup> atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan ± 200.000 km<sup>2</sup> diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Secara rinci luas wilayah menurut Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**Wilayah Administratif di Provinsi NTT Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kupang	30	218	22
2	Timor Tengah Selatan	32	228	12
3	Timor Tenga Utara	9	140	34
4	Belu	24	196	12
5	Alor	17	158	17
6	Flores Timur	18	209	17
7	Sikka	21	147	13
8	Ende	20	191	23
9	Ngada	9	78	16
10	Manggarai	9	132	17
11	Sumba Timur	22	140	16
12	Sumba Barat	6	45	8
13	Lembata	9	137	7
14	Rote Ndao	8	73	7
15	Manggarai Barat	7	116	5

16	Nagekeo	7	84	16
17	Sumba Tengah	4	43	-
18	Sumba Barat	8	94	2
19	Manggarai Timur	6	104	10
20	Kota Kupang	4	-	49
21	Sabu Raijua	6	42	5
Jumlah		285	2.469	300

Sumber : Data BPS NTT, 2016

Provinsi NTT terletak di selatan katulistiwa pada posisi  $8^{\circ} - 12^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $118^{\circ} - 125^{\circ}$  Bujur Timur. Batas-batas wilayah :

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
2. Di sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
3. Di sebelah Timur dengan Negara Timor Leste
4. Di sebelah Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keadaan topografi ini demikian mempunyai pengaruh terhadap pola kehidupan penduduk, yaitu pola pemukiman di gunung-gunung, sehingga terdapat variasi adat dan tipologi kehidupan yang sangat besar antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Nilai Nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT pada triwulan II-2016 mencapai Rp 20,68 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,29 % (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I-2016 yang sebesar 5,08 % (yoy) dan dibandingkan nasional yang sebesar 5,18% (yoy).

Adanya kegiatan Tour de Flores, rapat koordinasi pemerintah di hotel, masa liburan sekolah, peningkatan konsumsi Pemerintah seiring realisasi gaji ke-13 dan ke-14 Pegawai Negeri Sipil, dan meningkatnya konsumsi menjelang perayaan Idul Fitri mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT di triwulan II 2016.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan-III diperkirakan akan cenderung sedikit meningkat dengan kisaran 5,1-5,5% (yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan III diperkirakan didorong oleh kegiatan investasi seiring dengan penyerapan belanja modal yang masih cukup rendah. Konsumsi diperkirakan juga menjadi pendorong pertumbuhan seiring dengan adanya masa liburan sekolah yang masih berlangsung, tahun ajaran baru, untuk pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, kegiatan nasional Harganas serta adanya perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

**Tabel 1.6**

**Perkembangan Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2016**

Kota	YOY,%									
	I-15	II-15	III-15	IV-15	I-15	II-15	III-15	IV-15	I-16	II-16
NTT	7.78	8.10	4,13	7,76	5.39	6,01	6.74	4.92	5.04	5,02
Kota Kupang	7.99	8.31	4,27	8,32	5.81	6,57	7.08	5.07	5.16	5,23
Maumere	6.39	6.70	3,19	4,00	2.55	2,24	4.44	3.89	4.16	3,57

Sumber : BPS NTT, 2016

Inflasi Provinsi NTT triwulanan II 2016 mencapai 5,02% (yoy), sedikit menurun dibanding inflasi triwulan I 2016 yang sebesar 5,04% (yoy) namun masih jauh lebih tinggi dibanding inflasi tahunan nasional yang hanya sebesar 3,45% (yoy). Besarnya gap inflasi dengan nasional lebih disebabkan oleh relatif lebih tingginya inflasi NTT pada bulan April dan Mei 2016 ketika di saat yang sama, inflasi nasional justru mengalami perlambatan. Tingginya inflasi bahan makanan dan makanan jadi, minuman dan tembakau masih menjadi penyebab utama inflasi tahunan di NTT.

Pada triwulan III 2016, inflasi Provinsi NTT diperkirakan akan cenderung rendah dikarenakan oleh deflasi yang terjadi pada bulan Juli 2016 karena cukupnya pasokan bahan pangan, masih berpotensi terjadinya deflasi pada bulan Agustus seiring dengan kembali normalnya aktivitas paska libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri dan Harganas, serta potensi inflasi rendah di bulan September seiring dengan tidak adanya aktivitas khusus yang mampu menekan inflasi.

#### **4.2. Hasil Pengujian Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil dan Standar Deviasi**

Tingkat ketimpangan PDRB antar kabupaten/kota memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan di kabupaten/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi, ketimpangan pendapatan yang dilihat dari PDRB

per kapita antar kabupaten/kota, kemudian dianalisis menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

**Tabel 1.7**

**Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil di Provinsi NAD dan NTT**

**Tahun 2016**

<b>Provinsi</b>	<b>Indeks Williamson</b>	<b>Indeks Entropi Theil</b>
NAD	0.03905	1.3759
NTT	0.65019	1.4098

Sumber : Data BPS Provinsi Aceh dan NTT, Diolah

Pada tabel diatas menunjukkan angka ketimpangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di provinsi NAD dan NTT tahun 2016 yaitu Indeks Williamson di provinsi NAD 0.03905, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi wilayah rendah (merata), dan di provinsi NTT 0.65019, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi wilayah tinggi atau distribusi pendapatan relatif tidak merata. Selain memakai Indeks Williamson juga dapat memakai Indeks Entropi Theil untuk mengetahui besarnya ketimpangan, dari hasil analisis Indeks Entropi Theil dimana di provinsi NAD sebesar 1.3759 dan di provinsi NTT sebesar 1.4098, namun di provinsi NTT mengalami disparitas lebih tinggi dari pada di provinsi NAD.

**Tabel 1.8**

**Hasil Standar Deviasi di Provinsi NAD dan NTT Tahun 2016**

Provinsi	Standar Deviasi Masing-Masing Variabel			
	N	Jumlah Penduduk	PDRB	Pendapatan Per Kapita
NAD	23	140703.551	3811293	15.01887072
NTT	22	102085.886	5707819	28.08048989

Sumber : Data Sekunder BPS, Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yaitu untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 23 dan untuk provinsi Nusa tenggara Timur 22 yang berasal dari data BPS.

a. Jumlah Penduduk

Pada tabel diatas, variabel Jumlah Penduduk mempunyai nilai standar deviasi pada masing-masing provinsi, di provinsi NAD sebesar 140703.5512 dan di provinsi NTT sebesar 102085.886. hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi Jumlah Penduduk lebih kecil dari pada nilai standar deviasi pada PDRB di provinsi NAD sebesar 3811293 dan di provinsi NTT sebesar 5707819. Jika nilai standar deviasinya tinggi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, yang mengakibatkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.

Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan, akan tetapi pengaruhnya tidak besar terhadap ketimpangan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tabel diatas, variabel PDRB mempunyai nilai standar deviasi di masing-masing provinsi, provinsi NAD sebesar 3811293 dan di provinsi NTT sebesar 5707819. hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi paling besar dari pada nilai standar deviasi pada Jumlah Penduduk dan Pendapatan Per Kapita. Jika nilai standar deviasinya tinggi maka penyimpangan yang sangat tinggi, dan menyebabkan bias. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh besar terhadap ketimpangan.

c. Pendapatan Per Kapita

Pada tabel diatas, variabel Pendapatan Per Kapita pada masing-masing provinsi mempunyai nilai standar deviasi di provinsi NAD sebesar 15.01887072 dan di provinsi NTT sebesar 28.08048989. hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai standar deviasi pada Jumlah Penduduk. Jika nilai standar deviasinya rendah maka penyimpangan kecil atau merata. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa

Pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan.

#### **4.3. Pembahasan**

Dilihat dari rendahnya tingkat ketimpangan di Provinsi NAD dikarenakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan sektor ekonomi daerah, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan. Ketimpangan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa tertistribusi merata atau mendekati angka nol. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki banyak kandungan sumber daya alam seperti: Emas, Perak, Pabrik Semen Andalas, Pupuk AFF, minyak, Pertanian, Perkebunan. Kontribusi besar daerah yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah dari sektor pertambangan dan penggalian kemudian disusul sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang kaya akan minyak, gas bumi, dan hasil tambang lainnya. Disamping itu sektor pertanian dan perikanan juga memegang peranan yang signifikan. Sebagian besar rakyat NAD adalah kaum tani dan nelayan. Pertanian dan perikanan menjadi sektor penyumbang terbesar PDRB NAD. Produksi padi NAD menurut Dinas Pertanian dan Perkebunan NAD di tahun 2016 mencapai 2,3 juta ton gabah kering. Sedangkan untuk komoditi jagung mencapai 316 ribu ton. Kenaikan produksi juga dialami produksi tanaman keras, seperti kelapa sawit, kopi, dan karet.



Sementara dari sektor perikanan, produksi ikan tangkap dan ikan budidaya terus mengalami peningkatan. Pemerintah NAD memberikan perhatian khusus kepada tiga komoditi utama yaitu padi, jagung dan keledai. Pemerintah NAD berhasil mengembangkan areal sawah baru seluas 26,059 hektar dengan pola bantuan social masyarakat. Sektor perindustrian tidak terkonsentrasi di daerah kota saja melainkan sudah banyak di berbagai daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Didukung dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi yang akan mendorong peningkatan tingkat investasi yang selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh pada kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi NAD tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi NAD hingga bulan Agustus 2016 mencapai 64,26%, atau meningkat dibanding bulan Agustus 2015 yang mencapai 63,44%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NAD berada pada level 7,57%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,93%. Tingkat Kemiskinan di provinsi NAD berdasarkan data terakhir bulan Maret 2016 tercatat sebesar 16,73%. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan kondisi kemiskinan pada bulan Maret 2015 yang mencapai 17,08%. menurunnya tingkat kemiskinan di NAD tersebut diakibatkan oleh adanya penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 0,73%, sementara itu tingkat kemiskinan di daerah perkotaan cenderung meningkat sebesar 1,22%.

Prasarana jalan darat provinsi ini sepanjang 15.458,48 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 1.782,78 km dan jalan provinsi sepanjang 1.701,82 km. Untuk transportasi laut, terdapat 6 (enam) pelabuhan laut utama yaitu Sabang, Meulaboh, Lhokseumawe, Kuala Langsa, dan Malahayati yang sekaligus sebagai pelabuhan penyeberangan, pelabuhan penyeberangan yang lain adalah Pelabuhan Balohan. Provinsi ini juga memiliki Bandar udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang terletak di Kota Banda Aceh. Prasarana darat, laut maupun udara ini sangat membantu untuk menunjang kegiatan ekonomi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti halnya ekspor-impor ke luar atau pengiriman ke berbagai daerah.

Ketimpangan di provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa terdistribusi tidak merata (timpang) atau mendekati angka satu. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki banyak kandungan sumber daya alam seperti: semen kupang, mangan, minyak cendana. Kontribusi besar daerah yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dari sektor perikanan dan kelautan kemudian disusul sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang kaya akan keanekaragaman hasil laut, pertanian, perkebunan dan hasil tambang lainnya. Perekonomian Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh sektor perikanan dan kelautan, akan tetapi perairan Nusa Tenggara Timur yang relatif terbuka dan pengawasan yang terbatas menyebabkan praktek penangkapan ikan secara

illegal oleh kapal-kapal ikan dari negara lain. Penangkapan ikan yang menggunakan Bom, Cantrang, Potasium, dan racun sianida ikut memberikan andil terhadap tercemar dan rusaknya laut.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT per Februari 2016 sebesar 2,45 juta jiwa. Kondisi kesejahteraan masyarakat NTT menunjukkan perbaikan yang terlihat dari adanya penurunan presentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang atau menurun sebesar 10.610 orang dibandingkan bulan September 2015 yang sebesar 1.160,53 ribu orang. Hal ini didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian yang didorong peningkatan investasi serta daya beli masyarakat. Di sisi lain, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT pada tahun 2015 mencapai 62,67. IPM NTT cenderung meningkat apabila dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 62,26. Namun, apabila dibandingkan Provinsi lain di Indonesia, Provinsi NTT hanya berada pada peringkat ke-32 di atas Provinsi Papua Barat (61,73) dan Provinsi Papua (57,25). Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT mengalami sedikit peningkatan. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2015 mencapai 98,1% meningkat dibandingkan 2014 yang sebesar 98%, sementara kelompok umur 13-15 tahun mencapai 94,4%, sedangkan untuk kelompok 16-18 tahun mencapai 74,3%. Masih rendahnya angka APS tersebut menunjukkan bahwa kesadaran penduduk NTT untuk menempuh pendidikan

yang sesuai dengan kelompok umurnya masih tergolong rendah. Hal ini dimungkinkan karena kecenderungan pemuda untuk bekerja terlebih dahulu, terutama di sektor pertanian, selain kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Namun, kesadaran tersebut mulai muncul seiring adanya kebutuhan untuk peningkatan kemampuan diri seiring perkembangan umur.

Pendistribusian dana alokasi hanya terpusat di daerah perkotaan saja, sehingga menyebabkan suatu daerah ketimpangannya cenderung tinggi. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sesungguhnya dengan sumber daya yang melimpah ini NTT sangat potensial untuk menjadi kekuatan ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Kemungkinan keterbatasan sumber daya manusia dikawasan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menggali potensi yang ada, sedangkan sumber daya alamnya sangat berpotensi tetapi pengelolaannya masih sangat kurang atau belum optimal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar provinsi di Indonesia: Perbandingan antar provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nusa Tenggara Timur dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Nanggroe Aceh Darussalam kecil atau merata, dimungkinkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan sektor ekonomi daerah, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan. Selain itu, kemungkinan dengan diberlakukannya mengenai Pelaksanaan Syariat Islam dimana menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dimana dalam Syariat Islam itu sendiri memiliki tujuan yaitu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan spiritual dan rohani. Islam melarang monopoli, penimbunan harta dan melaksanakan perintah untuk mengeluarkan zakat dan sedekah, karena dengan begitu zakatnya lebih meningkat dan terdistribusi merata. Dalam Qonum NAD Nomor 10 tahun 2007 tentang Islam wajib bagi umat muslim untuk menunaikan zakat, dimana Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antar satu orang

dengan yang lain. Di antara masalah terpenting yang mendapat perhatian dalam pandangan Islam adalah pembagian kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi NAD hingga bulan Agustus 2016 mencapai 64,26%, atau meningkat dibanding bulan Agustus 2015 yang mencapai 63,44%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NAD berada pada level 7,57%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,93%. Tingkat Kemiskinan di Provinsi NAD berdasarkan data terakhir bulan Maret 2016 tercatat sebesar 16,73%. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan kondisi kemiskinan pada bulan Maret 2015 yang mencapai 17,08%. menurunnya tingkat kemiskinan di Aceh tersebut diakibatkan oleh adanya penurunan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan sebesar 0,73%, sementara itu tingkat kemiskinan di daerah perkotaan cenderung meningkat sebesar 1,22%.

2. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Nusa Tenggara Timur berbanding terbalik dengan NAD, distribusi pendapatannya tidak merata atau timpang, disamping NTT tidak menerapkan hukum syariat Islam, alokasi dana hanya terfokus pada suatu daerah saja, mobilitasnya yang kurang lancar, masih banyak sumber daya alam yang terbengkalai, keterbatasan kualitas sumber daya manusia perlu di berikan keterampilan atau skill, dan

teknologi yang masih jauh tertinggal. Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT per Februari 2016 sebesar 2,45 juta jiwa. Kondisi kesejahteraan masyarakat NTT menunjukkan perbaikan yang terlihat dari adanya penurunan presentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang atau menurun sebesar 10.610 orang dibandingkan bulan September 2015 yang sebesar 1.160,53 ribu orang. Hal ini didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian yang didorong peningkatan investasi serta daya beli masyarakat. Di sisi lain, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT pada tahun 2015 mencapai 62,67. IPM NTT cenderung meningkat apabila dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 62,26. Namun, apabila dibandingkan Provinsi lain di Indonesia, Provinsi NTT hanya berada pada peringkat ke-32 di atas Provinsi Papua Barat (61,73) dan Provinsi Papua (57,25). Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTT mengalami sedikit peningkatan. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2015 mencapai 98,1% meningkat dibandingkan 2014 yang sebesar 98%, sementara kelompok umur 13-15 tahun mencapai 94,4%, sedangkan untuk kelompok 16-18 tahun mencapai 74,3%. Masih rendahnya angka APS dan APM tersebut menunjukkan bahwa kesadaran penduduk NTT untuk menempuh

pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya masih tergolong rendah. Hal ini dimungkinkan karena kecenderungan pemuda untuk bekerja terlebih dahulu, terutama di sektor pertanian, selain kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Namun, kesadaran tersebut mulai muncul seiring adanya kebutuhan untuk peningkatan kemampuan diri seiring perkembangan umur.

## **5.2. Implikasi**

Dari hasil penelitian ini bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dapat di implikasikan:

1. Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, jadi pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi dalam melaksanakan tahap-tahap untuk mencapai pembangunan yang merata. Sehingga pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta pencapaian yang diinginkan.
2. Pemerintahan provinsi NTT juga diharapkan mampu menetapkan regulasi yang unggul agar pemusatan industri tidak hanya terdapat pada wilayah-wilayah yang potensial. Dan juga turut membangun infrastruktur yang berguna bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan untuk menunjang distribusi pendapatan.



3. Pemerintah di provinsi NTT dapat melakukan pembekalan keterampilan kepada pekerja kasar yang memiliki penghasilan relatif kecil. Pembekalan keterampilan yang dilakukan, bertujuan agar pekerja memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan menekan angka ketimpangan yang tinggi. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan guna menciptakan manusia yang berkualitas dan mempunyai karakter guna mengembangkan SDA potensial yang ada di provinsi NTT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. (2004), *Sejarah Peradaban Islam: Dari masa klasik sampai modern*. Yogyakarta. LESFI,
- An-Nabhani, Taqiy Al-Din. (1990), *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut Dar Al-Ummah.
- Arsyad, Lincolin (1997), *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_ (2004), *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Boediono (1985), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Nanggroe Aceh Darussalam. “*Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Angka 2016*”. BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Diambil 15 Desember 2017, dari [www.aceh.bpd.go.id](http://www.aceh.bpd.go.id)
- \_\_\_\_\_. “*Jumlah penduduk Nanggroe Aceh Darussalam 2016*”. BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Diambil 15 Desember 2017, dari [www.aceh.bpd.go.id](http://www.aceh.bpd.go.id)
- \_\_\_\_\_. “*Produk Domestik Regional Bruto 2016* ”. BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Diambil 15 Desember 2017, dari [www.aceh.bpd.go.id](http://www.aceh.bpd.go.id)
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. “*Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016*”. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diambil 15 Desember 2017, dari [www.ntt.bpd.go.id](http://www.ntt.bpd.go.id)

---

\_\_\_\_\_ . “Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur 2016”. BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Diambil 15 Desember 2017, dari [www.ntt.bpd.go.id](http://www.ntt.bpd.go.id)

---

\_\_\_\_\_ . “Produk Domestik Regional Bruto 2016 ”. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diambil 15 Desember 2017, dari [www.ntt.bpd.go.id](http://www.ntt.bpd.go.id)

Coto, Adrian. (2006), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Output Sektor Industri, Upah Minimum dan Tingkat pendidikan Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia”.

D Suryadarma, dkk. (2005), “A Reassessment of inequality and its role in poverty reduction in Indonesia”

Dumairy (1996), *Perekonomian Indonesia*. Jakarta.

\_\_\_\_\_ (1999), *Perekonomian Indonesia*, Edisi Pertama. Erlangga, Jakarta.

Firdaus. (2003), *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta.

Hartono, B. (2008), “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”, Tesis S-2 (dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hendra (2004), *Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD secara Komprehensif*. Yogyakarta.

Jhingan, M.L. (1990), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat (1997), *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMD YKPN.

\_\_\_\_\_ (2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_ (2004), “*Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi*”

Lili, Masli. (2008), “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*”. Jawa Barat.

Manik, Fitri R. (2009), “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan dengan Kabupaten Simalungun*”, (dipublikasikan) Universitas Sumatera Utara. Medan.

Myrdal, G. (1957), *Economic Theory and Under-development Regions*, London.

Oxfam (2017), “*Menuju Indonesia yang Lebih Setara*”.

Pangaribuan, Bosman. (2005), “*Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Blora*”

Pangemanan, Lyndon (2001), “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Indonesia*”

Safrida, dkk (2011), “*Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desaa Di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*”

Sjafrizal (2008), *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan. Pertama, Padang.

Sudjana. (1991). *In Statistika*. Bandung: Tarsito.

- Sugiyono (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharyadi, & Purwanto. (2009). *In Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono (1985), *Ekonomi Pembangunan*. LPEF-UI Bima Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (1997), *Ekonomi Pembangunan*. LPEF-UI Bima Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (2004), *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja. Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Sutarno dan Kuncoro. 2003. “*Perumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas*”
- Todaro, M. P. (1999), *Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah. ekonomi perencanaan dan pembangunan*. PT. raja grafindo pustaka, Jakarta.
- Umiyati, E., 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 1(6), hal 42-50.
- \_\_\_\_\_ (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, A.( 2001). *Kajian Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Wilayah Indonesia*. PEP-LIPI. Jakarta.

Williamson J.G. (1965), *Regional Inequality and The Process of National Development: a Description of Pattern*, Economic Culture Change, Vol XIII, no. 4.



**Tabel I. Jumlah penduduk dan PDRB atas dasar harga konstan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk (Fi)</b>	<b>PDRB (Yi)</b>
1	Aceh Singkil	114518	1538874.82
2	Aceh Selatan	224897	3743403.8
3	Aceh Tenggara	200014	3053444.93
4	Aceh Timur	402976	6827576.6
5	Aceh Tengah	196090	5174300.3
6	Aceh Barat	193791	5315210.5
7	Aceh Besar	392584	8858410.2
8	Aceh Utara	583892	15347961
9	Aceh Barat Daya	140689	2623870
10	Aceh Tamiang	278324	5280861.3
11	Aceh Jaya	86385	1783046.6
12	Simeulue	89117	1409970.4
13	Pidie	418882	6853560.14
14	Bireuen	435300	8830808.41
15	Gayo Lues	87881	1790153.03
16	Nagan Raya	155070	5663668.01
17	Bener Meriah	136821	3206536.5
18	Pidie Jaya	148719	2260711
19	Banda Aceh	155070	13528294.78
20	Sabang	33215	957238.6
21	Langsa	165890	3391382.6
22	Lhokseumawe	191407	6462392
23	Subulussalam	75188	1198938.44
	<b>Total</b>	<b>4906720</b>	<b>115100614</b>

Sumber : BPS NAD, 2016



**Tabel II. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk (Fi)</b>	<b>PDRB (Yi)</b>	<b>Yi-Y</b>	<b>(Yi-Y)<sup>2</sup></b>	<b>Fi/n</b>	<b>(Yi-Y)<sup>2</sup>*Fi/n</b>
1	Aceh Singkil	114518	1538874.82	-3465499.70	12009688170700.1	0.02	2.80294E+11
2	Aceh Selatan	224897	3743403.8	-1260970.72	1590047156697.3	0.05	72878997660
3	Aceh Tenggara	200014	3053444.93	-1950929.59	3806126265137.6	0.04	1.5515E+11
4	Aceh Timur	402976	6827576.6	1823202.08	3324065824516.3	0.08	2.72997E+11
5	Aceh Tengah	196090	5174300.3	169925.78	28874770708.6	0.04	1153938637
6	Aceh Barat	193791	5315210.5	310835.98	96619006462.6	0.04	3815969503
7	Aceh Besar	392584	8858410.2	3854035.68	14853591022713.1	0.08	1.18843E+12
8	Aceh Utara	583892	15347961	10343586.48	106989781269239.0	0.12	1.27316E+13
9	Aceh Barat Daya	140689	2623870	-2380504.52	5666801769740.4	0.03	1.62483E+11
10	Aceh Tamiang	278324	5280861.3	276486.78	76444939514.8	0.06	4336188196
11	Aceh Jaya	86385	1783046.6	-3221327.92	10376953568171.5	0.02	1.82691E+11
12	Simeulue	89117	1409970.4	-3594404.12	12919740977873.0	0.02	2.34651E+11
13	Pidie	418882	6853560.14	1849185.62	3419487457214.8	0.09	2.91918E+11
14	Bireuen	435300	8830808.41	3826433.89	14641596314540.5	0.09	1.29893E+12
15	Gayo Lues	87881	1790153.03	-3214221.49	10331219786777.8	0.02	1.85036E+11
16	Nagan Raya	155070	5663668.01	659293.49	434667905956.4	0.03	13737069198
17	Bener Meriah	136821	3206536.5	-1797838.02	3232221546157.5	0.03	90128595919
18	Pidie Jaya	148719	2260711	-2743663.52	7527689510978.8	0.03	2.28159E+11
19	Banda Aceh	155070	13528294.78	8523920.26	72657216598838.5	0.03	2.29623E+12
20	Sabang	33215	957238.6	-4047135.92	16379309154954.2	0.01	1.10876E+11
21	Langsa	165890	3391382.6	-1612991.92	2601742933985.3	0.03	87961639409
22	Lhokseumawe	191407	6462392	1458017.48	2125814971985.6	0.04	82926245301
23	Subulussalam	75188	1198938.44	-3805436.08	14481343758965.8	0.02	2.21905E+11

<b>Total</b>	<b>4906720</b>	<b>115100614</b>				<b>2.01983E+13</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5004374.52</b>				
<b>Akar</b>						<b>4494252.104</b>
<b>Indeks Williamson</b>						<b>0.03905</b>

Sumber : BPS NAD, 2016 (Data Dioalah)

**Tabel III. Perhitungan Indeks Entropi Theil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (X <sub>j</sub> )	pdrb (Y <sub>j</sub> )	Y <sub>j</sub> /y	X <sub>j</sub> /X	(Y <sub>j</sub> /Y)/(X <sub>j</sub> /X)
1	Aceh Singkil	114518	1538874.82	0.0133698	0.02	0.573
2	Aceh Selatan	224897	3743403.8	0.0325229	0.05	0.710
3	Aceh Tenggara	200014	3053444.93	0.0265285	0.04	0.651
4	Aceh Timur	402976	6827576.6	0.0593183	0.08	0.722
5	Aceh Tengah	196090	5174300.3	0.0449546	0.04	1.125
6	Aceh Barat	193791	5315210.5	0.0461788	0.04	1.169
7	Aceh Besar	392584	8858410.2	0.0769623	0.08	0.962
8	Aceh Utara	583892	15347961	0.1333439	0.12	1.121
9	Aceh Barat Daya	140689	2623870	0.0227963	0.03	0.795
10	Aceh Tamiang	278324	5280861.3	0.0458804	0.06	0.809
11	Aceh Jaya	86385	1783046.6	0.0154912	0.02	0.880
12	Simeulue	89117	1409970.4	0.0122499	0.02	0.674
13	Pidie	418882	6853560.14	0.0595441	0.09	0.697
14	Bireuen	435300	8830808.41	0.0767225	0.09	0.865
15	Gayo Lues	87881	1790153.03	0.0155529	0.02	0.868
16	Nagan Raya	155070	5663668.01	0.0492062	0.03	1.557
17	Bener Meriah	136821	3206536.5	0.0278586	0.03	0.999
18	Pidie Jaya	148719	2260711	0.0196412	0.03	0.648
19	Banda Aceh	155070	13528294.78	0.1175345	0.03	3.719
20	Sabang	33215	957238.6	0.0083165	0.01	1.229
21	Langsa	165890	3391382.6	0.0294645	0.03	0.872
22	Lhokseumawe	191407	6462392	0.0561456	0.04	1.439
23	Subulussalam	75188	1198938.44	0.0104164	0.02	0.680

<b>Total</b>	<b>4906720</b>	<b>115100614</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>23.763</b>
<b>Indeks Entropi Theil</b>					<b>1,3759</b>

Sumber : BPS NAD, 2016 (Data Diolah)

**Tabel IV. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (X)	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	Aceh Singkil	114518	-98817.65217	9764928381
2	Aceh Selatan	224897	11561.34783	133664763.6
3	Aceh Tenggara	200014	-13321.65217	177466416.6
4	Aceh Timur	402976	189640.3478	35963461524
5	Aceh Tengah	196090	-17245.65217	297412518.9
6	Aceh Barat	193791	-19544.65217	381993428.6
7	Aceh Besar	392584	179248.3478	32129970198
8	Aceh Utara	583892	370556.3478	1.37312E+11
9	Aceh Barat Daya	140689	-72646.65217	5277536072
10	Aceh Tamiang	278324	64988.34783	4223485353
11	Aceh Jaya	86385	-126950.6522	16116468087
12	Simeulue	89117	-124218.6522	15430273548
13	Pidie	418882	205546.3478	42249301105
14	Bireuen	435300	221964.3478	49268171706
15	Gayo Lues	87881	-125454.6522	15738869752
16	Nagan Raya	155070	-58265.65217	3394886223
17	Bener Meriah	136821	-76514.65217	5854491997
18	Pidie Jaya	148719	-64616.65217	4175311738
19	Banda Aceh	155070	-58265.65217	3394886223
20	Sabang	33215	-180120.6522	32443449340
21	Langsa	165890	-47445.65217	2251089910
22	Lhokseumawe	191407	-21928.65217	480865786.2
23	Subulussalam	75188	-138147.6522	19084773801

<b>Rata-rata</b>	<b>213335.6522</b>		
<b>Total</b>			<b>4.35545E+11</b>
			<b>19797489309</b>
<b>Standar Deviasi</b>			<b>140703.5512</b>

Sumber : BPS NAD, 2016 (Data Diolah)

**Tabel V. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

No	Kabupaten	PDRB (X)	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	Aceh Singkil	1538874.82	-3465499.7	1.20097E+13
2	Aceh Selatan	3743403.8	-1260970.72	1.59005E+12
3	Aceh Tenggara	3053444.93	-1950929.59	3.80613E+12
4	Aceh Timur	6827576.6	1823202.08	3.32407E+12
5	Aceh Tengah	5174300.3	169925.78	28874770709
6	Aceh Barat	5315210.5	310835.98	96619006463
7	Aceh Besar	8858410.2	3854035.68	1.48536E+13
8	Aceh Utara	15347961	10343586.48	1.0699E+14
9	Aceh Barat Daya	2623870	-2380504.52	5.6668E+12
10	Aceh Tamiang	5280861.3	276486.78	76444939515
11	Aceh Jaya	1783046.6	-3221327.92	1.0377E+13
12	Simeulue	1409970.4	-3594404.12	1.29197E+13
13	Pidie	6853560.14	1849185.62	3.41949E+12
14	Bireuen	8830808.41	3826433.89	1.46416E+13
15	Gayo Lues	1790153.03	-3214221.49	1.03312E+13
16	Nagan Raya	5663668.01	659293.49	4.34668E+11
17	Bener Meriah	3206536.5	-1797838.02	3.23222E+12
18	Pidie Jaya	2260711	-2743663.52	7.52769E+12
19	Banda Aceh	13528294.78	8523920.26	7.26572E+13
20	Sabang	957238.6	-4047135.92	1.63793E+13
21	Langsa	3391382.6	-1612991.92	2.60174E+12
22	Lhokseumawe	6462392	1458017.48	2.12581E+12
23	Subulussalam	1198938.44	-3805436.08	1.44813E+13
	<b>Rata-rata</b>	<b>5004374.52</b>		

<b>Total</b>			<b>3.19571E+14</b>
			<b>1.4526E+13</b>
<b>Standar Deviasi</b>			<b>3811293</b>

Sumber : BPS NAD, 2016 (Data Diolah)



**Tabel VI. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	PDRB	Per kapita X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	Aceh Singkil	114518	1538874.82	13.43784226	-10.7983896	116.605218
2	Aceh Selatan	224897	3743403.8	16.64496992	-7.591261944	57.6272579
3	Aceh Tenggara	200014	3053444.93	15.26615602	-8.970075844	80.46226065
4	Aceh Timur	402976	6827576.6	16.94288642	-7.293345438	53.19288768
5	Aceh Tengah	196090	5174300.3	26.38737467	2.151142812	4.627415396
6	Aceh Barat	193791	5315210.5	27.42754049	3.191308631	10.18445078
7	Aceh Besar	392584	8858410.2	22.5643689	-1.671862964	2.79512577
8	Aceh Utara	583892	15347961	26.28561618	2.049384312	4.199976059
9	Aceh Barat Daya	140689	2623870	18.65014322	-5.58608864	31.20438629
10	Aceh Tamiang	278324	5280861.3	18.97379062	-5.262441245	27.69328786
11	Aceh Jaya	86385	1783046.6	20.64069688	-3.595534983	12.92787181
12	Simeulue	89117	1409970.4	15.82156491	-8.414666954	70.80661995
13	Pidie	418882	6853560.14	16.36155323	-7.874678634	62.01056358
14	Bireuen	435300	8830808.41	20.28671815	-3.949513715	15.59865858
15	Gayo Lues	87881	1790153.03	20.37019413	-3.866037737	14.94624779
16	Nagan Raya	155070	5663668.01	36.52329922	12.28706736	150.9720242
17	Bener Meriah	136821	3206536.5	23.43599667	-0.800235196	0.640376369
18	Pidie Jaya	148719	2260711	15.20122513	-9.035006734	81.63134669
19	Banda Aceh	155070	13528294.78	87.23992249	63.00369062	3969.465032
20	Sabang	33215	957238.6	28.81946711	4.583235245	21.00604531
21	Langsa	165890	3391382.6	20.4435626	-3.792669262	14.38434013
22	Lhokseumawe	191407	6462392	33.76256877	9.526336904	90.7510948
23	Subulussalam	75188	1198938.44	15.94587487	-8.29035699	68.73001902
	<b>Rata-rata</b>			<b>24.23623186</b>		

<b>Total</b>					<b>4962.462507</b>
					<b>225.5664776</b>
<b>Standar Deviasi</b>					<b>15.01887072</b>

Sumber : BPS NAD, 2016 (Data Diolah)

**Tabel VII. Jumlah penduduk dan PDRB atas dasar harga konstan di provinsi Nusa Tenggara Timur**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk (Fi)</b>	<b>PDRB (Yi)</b>
1	Sumba Barat	123913	10026962.72
2	Sumba Timur	249606	13783397.23
3	Kupang	360228	11567760.47
4	Timor Tengah Selatan	461681	8924737.18
5	Timor Tengah Utara	247216	10126184.75
6	Belu	210307	11941643.74
7	Alor	201515	8572338.31
8	Lembata	134573	7476395.28
9	Flores Timur	248889	12274640.55
10	Sikka	315477	9061870.44
11	Ende	270886	13169861.53
12	Ngada	156101	12757718.31
13	Manggarai	324014	8033223
14	Rote Ndao	153792	10697424.75
15	Manggarai Barat	257582	7467117.65
16	Sumba Tengah	69606	9319828.92
17	Sumba Barat Daya	325699	6113263.41
18	Nagekeo	141310	8466708.64
19	Manggarai Timur	276620	6325647.38
20	Sabu Raijua	88826	7633529.11
21	Malaka	183387	8752891.9
22	Kota Kupang	402286	34370350.99
	<b>TOTAL</b>	<b>5203514</b>	<b>236863496</b>

Sumber : BPS NTT, 2016

**Tabel VII. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Nusa Tenggara Timur**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk (fi)</b>	<b>PDRB (Yi)</b>	<b>Yi-Y</b>	<b>(Yi-Y)<sup>2</sup></b>	<b>Fi/n</b>	<b>(Yi-Y)<sup>2</sup>*Fi/n</b>
1	Sumba Barat	123913	10026962.72	-739560	546948752907	0.024	13024671562
2	Sumba Timur	249606	13783397.23	3016875	9101532790943	0.048	4.36589E+11
3	Kupang	360228	11567760.47	801238	641982192792	0.069	44443036253
4	Timor Tengah Selatan	461681	8924737.18	-1841785	3392173375936	0.089	3.0097E+11
5	Timor Tengah Utara	247216	10126184.75	-640338	410032507423	0.048	19480411959
6	Belu	210307	11941643.74	1175121	1380909794094	0.040	55811322131
7	Alor	201515	8572338.31	-2194184	4814444510980	0.039	1.86448E+11
8	Lembata	134573	7476395.28	-3290127	10824937500654	0.026	2.79954E+11
9	Flores Timur	248889	12274640.55	1508118	2274419879988	0.048	1.08788E+11
10	Sikka	315477	9061870.44	-1704652	2905838840922	0.061	1.76174E+11
11	Ende	270886	13169861.53	2403339	5776038217830	0.052	3.00691E+11
12	Ngada	156101	12757718.31	1991196	3964860525679	0.030	1.18942E+11
13	Manggarai	324014	8033223	-2733300	7470926469787	0.062	4.65202E+11
14	Rote Ndao	153792	10697424.75	-69098	4774506970	0.030	141112520.5
15	Manggarai Barat	257582	7467117.65	-3299405	10886072742135	0.050	5.38877E+11
16	Sumba Tengah	69606	9319828.92	-1446694	2092922480125	0.013	27996458192
17	Sumba Barat Daya	325699	6113263.41	-4653259	21652820691677	0.063	1.3553E+12
18	Nagekeo	141310	8466708.64	-2299814	5289144054081	0.027	1.43635E+11
19	Manggarai Timur	276620	6325647.38	-4440875	19721372340117	0.053	1.04839E+12
20	Sabu Raijua	88826	7633529.11	-3132993	9815647940654	0.017	1.67557E+11
21	Malaka	183387	8752891.9	-2013631	4054708423909	0.035	1.429E+11
22	Kota Kupang	402286	34370350.99	23603828	557140716681624	0.077	4.30728E+13
	<b>TOTAL N</b>	<b>5203514</b>	<b>236863496</b>				<b>4.9004E+13</b>

<b>RATA-RATA</b>		<b>10766523</b>				
<b>Akar</b>						<b>7000294</b>
<b>Indeks Williamson</b>						<b>0.650191</b>

Sumber : BPS NTT, 2016 (Data Diolah)

**Tabel IX. Perhitungan Indeks Entropi Theil Provinsi Nusa Tenggara Timur**

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Penduduk (Xj)</b>	<b>PRDB (Yj)</b>	<b>Yj/Y</b>	<b>Xj/X</b>	<b>(Yj/Y)/(Xj/X)</b>
1	Sumba Barat	123913	10026962.72	0.042332241	0.023813331	1.777669907
2	Sumba Timur	249606	13783397.23	0.05819131	0.047968738	1.213109053
3	Kupang	360228	11567760.47	0.048837244	0.069227833	0.705456781
4	Timor Tengah Selatan	461681	8924737.18	0.037678821	0.08872485	0.424670434
5	Timor Tengah Utara	247216	10126184.75	0.042751141	0.047509433	0.899845322
6	Belu	210307	11941643.74	0.05041572	0.040416342	1.24740929
7	Alor	201515	8572338.31	0.036191049	0.038726714	0.934524121
8	Lembata	134573	7476395.28	0.031564151	0.025861946	1.22048631
9	Flores Timur	248889	12274640.55	0.05182158	0.047830947	1.083432034
10	Sikka	315477	9061870.44	0.038257775	0.060627684	0.631028157
11	Ende	270886	13169861.53	0.05560106	0.052058282	1.068054073
12	Ngada	156101	12757718.31	0.053861057	0.029999151	1.795419408
13	Manggarai	324014	8033223	0.03391499	0.062268306	0.544658944
14	Rote Ndao	153792	10697424.75	0.045162826	0.029555412	1.528072948
15	Manggarai Barat	257582	7467117.65	0.031524983	0.049501548	0.636848419
16	Sumba Tengah	69606	9319828.92	0.039346835	0.01337673	2.941439059
17	Sumba Barat Daya	325699	6113263.41	0.025809226	0.062592125	0.412339819
18	Nagekeo	141310	8466708.64	0.035745097	0.027156648	1.316255838
19	Manggarai Timur	276620	6325647.38	0.026705877	0.05316023	0.502365716
20	Sabu Raijua	88826	7633529.11	0.032227546	0.017070387	1.887921153
21	Malaka	183387	8752891.9	0.036953317	0.035242915	1.048531811
22	Kota Kupang	402286	34370350.99	0.145106154	0.077310448	1.876928117

<b>Total</b>	<b>5203514</b>	<b>236863496</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25.69646671</b>
<b>Indeks Entropi Theil</b>					<b>1,4098</b>

Sumber : BPS NTT, 2016 (Data Diolah)

**Tabel X. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (X)	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	Sumba Barat	123913	-112610.3636	12681093998
2	Sumba Timur	249606	13082.63636	171155374.2
3	Kupang	360228	123704.6364	15302837058
4	Timor Tengah Selatan	461681	225157.6364	50695961213
5	Timor Tengah Utara	247216	10692.63636	114332472.4
6	Belu	210307	-26216.36364	687297722.3
7	Alor	201515	-35008.36364	1225585524
8	Lembata	134573	-101950.3636	10393876646
9	Flores Timur	248889	12365.63636	152908962.7
10	Sikka	315477	78953.63636	6233676695
11	Ende	270886	34362.63636	1180790778
12	Ngada	156101	-80422.36364	6467756573
13	Manggarai	324014	87490.63636	7654611451
14	Rote Ndao	153792	-82731.36364	6844478529
15	Manggarai Barat	257582	21058.63636	443466165.5
16	Sumba Tengah	69606	-166917.3636	27861406283
17	Sumba Barat Daya	325699	89175.63636	7952294121
18	Nagekeo	141310	-95213.36364	9065584615
19	Manggarai Timur	276620	40096.63636	1607740248
20	Sabu Raijua	88826	-147697.3636	21814511225
21	Malaka	183387	-53136.36364	2823473140
22	Kota Kupang	402286	165762.6364	27477251614
	<b>Rata-rata</b>	<b>236523.3636</b>		



<b>Total</b>			<b>2.18852E+11</b>
			<b>10421528115</b>
<b>standar deviasi</b>			<b>102085.886</b>

Sumber : BPS NTT, 2016 (Data Diolah)

**Tabel XI. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten	PDRB (X)	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	Sumba Barat	10026962.72	-739559.8373	5.46949E+11
2	Sumba Timur	13783397.23	3016874.673	9.10153E+12
3	Kupang	11567760.47	801237.9127	6.41982E+11
4	Timor Tengah Selatan	8924737.18	-1841785.377	3.39217E+12
5	Timor Tengah Utara	10126184.75	-640337.8073	4.10033E+11
6	Belu	11941643.74	1175121.183	1.38091E+12
7	Alor	8572338.31	-2194184.247	4.81444E+12
8	Lembata	7476395.28	-3290127.277	1.08249E+13
9	Flores Timur	12274640.55	1508117.993	2.27442E+12
10	Sikka	9061870.44	-1704652.117	2.90584E+12
11	Ende	13169861.53	2403338.973	5.77604E+12
12	Ngada	12757718.31	1991195.753	3.96486E+12
13	Manggarai	8033223	-2733299.557	7.47093E+12
14	Rote Ndao	10697424.75	-69097.80727	4774506970
15	Manggarai Barat	7467117.65	-3299404.907	1.08861E+13
16	Sumba Tengah	9319828.92	-1446693.637	2.09292E+12
17	Sumba Barat Daya	6113263.41	-4653259.147	2.16528E+13
18	Nagekeo	8466708.64	-2299813.917	5.28914E+12
19	Manggarai Timur	6325647.38	-4440875.177	1.97214E+13
20	Sabu Raijua	7633529.11	-3132993.447	9.81565E+12
21	Malaka	8752891.9	-2013630.657	4.05471E+12
22	Kota Kupang	34370350.99	23603828.43	5.57141E+14
	<b>Rata-rata</b>	<b>10766522.56</b>		

<b>Total</b>			<b>6.84163E+14</b>
			<b>3.25792E+13</b>
<b>Standar Deviasi</b>			<b>5707819.303</b>

Sumber : BPS NTT, 2016 (Data Diolah)

**Tabel XII. Perhitungan Standar Deviasi dari Masing-masing Variabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	PDRB	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	Sumba Barat	123913	10026962.72	80.91937666	27.75115447	770.1265747
2	Sumba Timur	249606	13783397.23	55.22061661	2.052394427	4.212322885
3	Kupang	360228	11567760.47	32.11233016	-21.05589202	443.3505888
4	Timor Tengah Selatan	461681	8924737.18	19.33096051	-33.83726167	1144.960278
5	Timor Tengah Utara	247216	10126184.75	40.96087935	-12.20734283	149.019219
6	Belu	210307	11941643.74	56.78196037	3.613738188	13.05910369
7	Alor	201515	8572338.31	42.53945518	-10.62876701	112.9706881
8	Lembata	134573	7476395.28	55.5564287	2.38820652	5.70353038
9	Flores Timur	248889	12274640.55	49.31773019	-3.850491992	14.82628858
10	Sikka	315477	9061870.44	28.7243458	-24.44387638	597.5030927
11	Ende	270886	13169861.53	48.61772676	-4.550495429	20.70700865
12	Ngada	156101	12757718.31	81.72733237	28.55911018	815.6227745
13	Manggarai	324014	8033223	24.79282685	-28.37539533	805.1630602
14	Rote Ndao	153792	10697424.75	69.5577452	16.38952302	268.6164647
15	Manggarai Barat	257582	7467117.65	28.98928361	-24.17893858	584.6210708
16	Sumba Tengah	69606	9319828.92	133.8940453	80.72582316	6516.658524
17	Sumba Barat Daya	325699	6113263.41	18.76967203	-34.39855016	1183.260253
18	Nagekeo	141310	8466708.64	59.91584913	6.747626941	45.53046934
19	Manggarai Timur	276620	6325647.38	22.8676429	-30.30057928	918.1251048
20	Sabu Raijua	88826	7633529.11	85.93800363	32.76978144	1073.858576
21	Malaka	183387	8752891.9	47.72907513	-5.439147059	29.58432073
22	Kota Kupang	402286	34370350.99	85.43760158	32.2693794	1041.312847
	<b>Rata-rata</b>			<b>53.16822218</b>		

<b>Total</b>					<b>16558.79216</b>
					<b>788.5139124</b>
<b>standar deviasi</b>					<b>28.08048989</b>

Sumber : BPS NTT, 2016 (Data Diolah)

